

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E. (2021, Februari 18). *Konflik Senjata di Papua Belum Tuntas, Ini 7 Kasus Besarnya*. Dipetik Januari 19, 2022, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1433982/konflik-senjata-di-papua-belum-tuntas-ini-7-kasus-besarnya/full&view=ok>
- Amali, Z. (2020, Maret 04). *Pemekaran Papua Selatan adalah Lagu Lama Tutupi Rasisme*. Retrieved Juni 20, 2023, from Tirto.id: <https://tirto.id/pemekaran-papua-selatan-adalah-lagu-lama-tutupi-rasisme-eCDv>
- Aminudin, A. (2019). *Kontestasi Elit Politik Lokal Dalam Rencana Pemekaran Daerah (Studi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah)*. Yogyakarta: Unpublished.
- Badan Legislasi DPR-RI.(2022).Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Bisnis.com. (2016, September 07). *Pemotongan Dana Bagi Hasil Freeport: Pemprov Papua Nilai Pemerintah Pusat Tidak Adil*. Retrieved Juni 20, 2023, from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160907/9/582044/pemotongan-dana-bagi-hasil-freeport-pemprov-papua-nilai-pemerintah-pusat-tidak-adil>
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms Of Capital*. (J. Richardson, Penyunt.) New York : Greenwood.
- Brata, A. G. (2008). *Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit*. *Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi* (pp. 1-9). Surabaya: Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga.
- Burhan, R. (2019). *Dinamika Pemekaran Daerah (Studi Kasus Rencana Pemekaran Provinsi Luwu Raya)*. Yogyakarta: Unpublished.
- CNNIndonesia.com. (2022, September 28). *Freeport Klaim Setor Rp 7 T Tiap Tahun Untuk Papua*. Retrieved Juni 20, 2023, from CNNIndonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220927165433-92-853342/freeport-klaim-setor-rp7-t-tiap-tahun-untuk-papua>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Vol. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Darwis. (2011, Agustus). Elit Lokal dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali . *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2, 279-410.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2).
- Dhakidae, D. (2001). Aceh jakarta Papua : akar permasalahan dan alternatif proses penyelesaian konflik. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia.
- Digeser, P. E. (2022). Collaboration and Its Political Functions. . *American Political Science Review*, 200-212.
- Efriza. (2020, September 19). *Kondisi Ekonomi Papua dan Papua Barat Tetap Kuat Ditengah Pandemi*. Retrieved Juni 20, 2023, from Pskp.or.id: <http://www.pskp.or.id/2020/09/19/kondisi-ekonomi-papua-dan-papua-barat-tetap-kuat-ditengah-pandemi/>
- Fachrurrizal, M. I., & Hayati, R. (2014). Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten di Wilayah Proyeksi Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 1-6.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity In Diversity? The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 41, 57-59.
- Furnivall, J. S. (1948). *Colonial Policy And Practice: A Comparative Study Of Burma And Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gobay, J. (2022). Rencana Pemekaran Provinsi Ditengah Prokontra Di Tanah Papua. Papua, Indonesia.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia.
- Halim, A. (2008). *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hardy, C., Lawrence, T. B., & Grant, D. (2005, January 1). Discourse and Collaboration . *The Rule of Conversations and Collective Identity*, 30, 58-77.
- Hidayat, S. (2005). *Too Much Too Soon; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jpnn.com. (2022, Mei 17). *DPR Terima Surpres soal RUU DOB Papua, Komisi II Tinggal Tunggu Penugasan*. Retrieved Juni 20, 2023, from JPNN.com: <https://m.jpnn.com/news/dpr-terima-surpres-soal-ruu-dob-papua-komisi-ii-tinggal-tunggu-penugasan>



- Kimura, E. (2013). *Political change and territoriality in Indonesia: Provincial proliferation* (Vol. 46). Routledge.
- Kusakabe, E. (2012). Social capital networks for achieving sustainable development. *Local Environment*, 17(10), 1043-1062.
- Kompas.com. (2022, Agustus 04). *Mengenal 5 Wilayah Adat di Papua yang Menjadi Dasar Pemekaran Wilayah*. Retrieved Juni 20, 2023, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/074200778/mengenal-5-wilayah-adat-di-papua-yang-menjadi-dasar-pemekaran-wilayah?page=all>
- Leefan, A. (2012). *Etnosentrisme Dan Politik Representasi Di Era Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production Of space*. Cambridge, Massachusetts, USA: Basil Blackwell.
- Marsh, David, & Stoker, G. (2012). *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Muslihin. (2008). *Pemindahan Ibukota Definitif Provinsi Maluku Utara : Studi Tentang Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Proses Pemidahan Ibukota Dari Ternate Ke Sofifi*. DIY, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Nabire.net. (2015, Juli 13). *Dari 79 Perusahaan Tambang Yang Ada di Nabire Hanya 23 Yang Memiliki Ijin Aktif*. Retrieved Juni 20, 2023, from Nabire.net: <http://www.nabire.net/dari-79-perusahaan-tambang-yang-ada-di-nabire-hanya-23-yang-memiliki-ijin-aktif/#close-modal>
- Nabire.net. (2022, Februari 25). *Nabire Bukan Bagian Dari Meepago, Pemekaran Harus Didasarkan Wilayah Adat*. Retrieved Juni 20, 2023, from Nabire.net: <https://www.nabire.net/nabire-bukan-bagian-dari-meepago-pemekaran-harus-didasarkan-wilayah-adat/>
- Ni'am, S. (2022, Desember 29). *Bupati Mimika Eltinus Omaleng Segera Jalani Sidang Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja*. Retrieved Juni 20, 2023, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/17090381/Bupati-mimika-eltinus-omaleng-segera-jalani-sidang-dugaan-korupsi>
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. (2007). *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pareto, V. (1935). *The Mind And Society* (Vol. 4). (A. Livingston, Penyunt.) New York: Harcourt, Brace and Company.
- PPKK FISIPOL UGM & Gugus Tugas Papua. (2020). *Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Tengah: Urgensi Reinstrumentasi Otonomi Khusus Papua*. Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama. Yogyakarta: PPKK UGM.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**POLITIK PENENTUAN LOKASI IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH**

Muhammad Zulfikar Ilun Fajar Jaya, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Pratama, I. T., Zauhar, S., & Rozikin, M. (2018, Juli). Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Stakeholder. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10, 47-55.
- Purnamasari, R. (2017). Pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko: Lahirnya Kabupaten Sarolangun dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun 1999-2011. Padang: Unpublished.
- Putri, B. U. (2021, Juni 9). *Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah*. Dipetik Januari 20, 2022, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1470584/majelis-rakyat-papua-sebut-warga-tak-ingin-ada-pemekaran-wilayah>
- Rahardjo, A. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli, L. (2006). Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat. *Jurnal Penelitian Politik*, 25-41.
- Ruhiyanto, A. (2021). *Membangun Legitimasi Negara Melalui Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Setyaningrum, P. (2022, 8 4). *Mengenal 5 Wilayah Adat di Papua yang Menjadi Dasar Pemekaran Wilayah* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal 5 Wilayah Adat di Papua yang Menjadi Dasar Pemekaran Wilayah", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/074200778/mengenal-5-wilayah-adat-di-papua-yang-menjadi-dasar-pemekaran-wilayah?page=all>
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shin, B. (2021). Exploring network measures of social capital: toward more relational measurement. *Journal of Planning Literature*, 36(3), 328-344.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Supriatma, Made.(2023). Masa Depan Papua Terkunci oleh Masa Lalu ?. *Jurnal Prisma* 2 Volume 42, 2023. Hal. 92-103.
- Suryawan, I. N. (2011). *Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua* (Vol. 15). Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Timmer, J. (2007). Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua. Dalam H. S. Nordholt, G. v. Klinken, & I. Karang-Hoogenboom (Penyunt.), *Politik Lokal di Indonesia* (hal. 596-625). Jakarta: Buku Obor & KITLV-Jakarta.
- Tirtosudarmo, R. (2008). Paradigma Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Dominasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 10, 27-52.



Wabiser. (2021). *Papua Dari Pemekaran Ke Pemekaran*. CV. Widina Media Utama

Wiener, A. (2014). *A theory of contestation*. Hamburg: Springer.

Yusuf, M. (2019). *Tata Kelola Konflik Penetapan Ibukota Kecamatan Pemekaran di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Unpublished.

### **Dokumen dan Media:**

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang percepatan UU No. 45 Tahun 1999 terkait pemekaran tiga wilayah Papua.

Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim 502 Kebangkitan Provinsi Papua Tengah 15 Juni 2010

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI, Usulan Pembentukan DOB. 12 November 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Papua 2023.

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemekaran wilayah.

Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang percepatan pembangunan Irian Jaya.

UU Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Diakses pada 26 Januari 2022 <https://seputarpapua.com/view/ibukota-provinsi-papua-tengah-disepakati-di-Mimika.html>

Diakses pada 26 Januari 2022 <https://mitrapol.com/2021/01/26/diunggulkan-jadi-ibu-kota-provinsi-papua-tengah-mimika-tolak-gabung-mee-pago/>

Diakses pada 26 Januari 2022 <https://humas.nabirekab.go.id/2021/02/Bupati-nabire-yang-juga-ketua-asosiasi-Bupati-meepago-dan-ketua-tim-pemekaran-provinsi-papua-tengah-menunda-rapat-koodinasi-pemekaran-papua-tengah-di-Mimika/>

Diakses pada 15 Juni 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/konflik-pemekaran-ibu-kota-wilayah-adat-asn-hingga-migrasi-ke-papua-/6652658.html>

Diakses pada 15 Juni 2023

<https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/074200778/mengenal-5-wilayah-adat-di-papua-yang-menjadi-dasar-pemekaran-wilayah?page=all>



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

## POLITIK PENENTUAN LOKASI IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH

Muhammad Zulfikar Ilun Fajar Jaya, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Diakses pada 16 Juni 2023 <https://www.nabire.net/nabire-bukan-bagian-dari-meepago-pemekaran-harus-didasarkan-wilayah-adat/>

Diakses pada 16 Juni 2023 [https://papua.tribunnews.com/2022/06/30/menjelang-pengesahan-dob-pemuda-adat-tetap-menolak-nabire-menjadi-ibu-kota-provinsi-papua-tengah#google\\_vignette](https://papua.tribunnews.com/2022/06/30/menjelang-pengesahan-dob-pemuda-adat-tetap-menolak-nabire-menjadi-ibu-kota-provinsi-papua-tengah#google_vignette)

Diakses pada 16 Juni 2023 <https://www.jpnn.com/news/perlu-2-perppu-setelah-pengesahan-3-ruu-dob-di-papua>

Diakses pada 17 Juni 2023 <https://humas.nabirekab.go.id/2021/02/alasan-belum-terkoordinasi-Bupati-isaias-menunda-rapat-koodinasi-pemekaran-papua-tengah-di-timika/>

Diakses pada 17 Juni 2023 24 September 2022. Lihat juga. <https://nabirekab.go.id/portal/2022/11/harapan-dan-tantangan-pembangunan-provinsi-papua-tengah/>

Diakses pada 17 Juni 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/konflik-pemekaran-ibu-kota-wilayah-adat-asn-hingga-migrasi-ke-papua-/6652658.html>

Diakses pada 04 Agustus 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=r-FYp0JBUQ>

Diakses pada 03 September 2023. <https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi2-Raker-Legislati-Panja-Tim-Pemerintah-DPD-Pembahasan-DIM-3-RUU-Pembentukan-Provinsi-Papua>.

Diakses pada 13 September 2023 <https://papuaposnabire.com/article/read/11479-bupatiintanjayadukungnabiredipapuatengahdanjadiibukota>